

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Stewardship (*Stewardship Theory*).

Dalam hubungannya dengan sektor publik, teori yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah teori stewardship. Teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson *and* Davis, 1991). Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Nosihana dan Yaya, 2016). Dengan kata lain teori stewardship ini dapat diterapkan kepada organisasi publik non profit seperti pemerintah daerah.

##### 2. Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah yaitu terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, serta perangkat daerah lainnya yang menjadi penyelenggara dari pemerintah daerah itu sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan asas otonomi dan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-

luasnya, dan berprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang dengan melihat karakteristik dan keberagaman di suatu daerah tersebut. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara pemerintah pusat serta dengan pemerintah provinsi, atau hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatur keuangan, pelayanan publik, serta pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil dan telah diatur dalam Undang-Undang.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan menggunakan pembagian penerimaan yang berbeda di setiap daerah dengan kebutuhan masing-masing yang mengacu pada Undang-Undang yang mengatur Dana Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah.

Sesuai Undang-Undang No. 33 tahun 2004, asal dari pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup PAD itu sendiri ialah hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dapat dipisahkan, peserta PAD lain-lain yang legal secara Undang-Undang.

- b. Dana Perimbangan, dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus.
- c. Pendapatan daerah lain lain yang sah maupun legal sesuai dengan Undang-Undang.

### 3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 adalah laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Kemudian laporan keuangan pemerintah daerah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan agar di teliti tingkat kebenarannya. Sehingga nantinya apabila laporan itu tidak bertentangan/tidak menyimpang, maka laporan dapat dikatakan Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pentingnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Dengan demikian laporan keuangan dapat bermanfaat bagi pemakai sesuai dengan kebutuhannya. Syarat yang harus terpenuhi dalam laporan keuangan sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu:

a. Relevan.

Laporan keuangan dapat dinyatakan relevan apabila di dalamnya terdapat informasi yang bisa mempengaruhi keputusan para penggunanya dan dapat membantu untuk mengevaluasi apa yang terjadi pada masa lalu dan masa kini serta masa depan.

b. Andal.

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan memuat informasi secara wajar, mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, serta netral tidak berpihak pada siapapun. Informasi keuangan dapat digunakan sebagai acuan bagi para penggunanya.

c. Dapat Dibandingkan.

Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan. Laporan keuangan masa lalu dengan yang sekarang dapat dibandingkan agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja pada masa lalu sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama pada masa mendatang.

d. Dapat Dipahami.

Informasi yang ada di laporan keuangan seharusnya dapat dipahami oleh para penggunanya maupun para pengambil keputusan, sehingga dapat dinyatakan bahwa informasi laporan keuangan bisa disesuaikan dengan batas pemahaman para penggunanya.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tujuan umum dari laporan keuangan yaitu menyajikan informasi posisi keuangan, arus kas, kinerja keuangan, dan realisasi anggaran suatu entitas pelaporan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan (Alamsyah dkk., 2017). Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan berguna untuk memprediksi besarnya biaya yang akan timbul untuk operasi yang akan dilakukan.

Tidak sepenuhnya informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai informasi sebagai acuan untuk mencapai tujuan, diperlukan sebuah informasi tambahan yang dapat berupa laporan non keuangan, sehingga lebih komprehensif dalam memberikan acuan untuk mencapai tujuan suatu organisasi publik.

#### 4. Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Ihsanti, 2014). Kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan kapasitasnya untuk menjalankan fungsi-fungsinya untuk menjalankan suatu sistem yang ada dalam sebuah organisasi serta menjadi kunci sukses tercapainya tujuan yang ada dalam organisasi tersebut. Kompetensi sumber daya manusia memiliki beberapa karakteristik yaitu berupa pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki setiap individu masing-masing.

Menurut Wijayanti (2017), kompetensi sebagai kemampuan yang ada pada diri seseorang dalam menghasilkan sesuatu pada pekerjaannya termasuk diantaranya kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan dan mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan suatu manfaat dari sesuatu yang disepakati. Sumber daya manusia yang terampil sekaligus memiliki pengetahuan di bidang akuntansi akan dapat membuat laporan keuangan secara cepat dan mudah sesuai dengan standar yang berlaku.

Menurut Harnoni (2016), kapasitas sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus sebagai penggerak roda dalam sebuah organisasi yang sebagaimana diperuntukkan untuk mewujudkan visi misi dan tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia sebagai penggerak roda organisasi sangat dibutuhkan supaya organisasi tersebut berjalan dengan baik serta terarah sesuai dengan tujuan dari organisasi itu.

##### 5. Teknologi Informasi.

Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, menyusun, dan menyimpan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dimana kualitas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintahan (Sutabri, 2014). Teknologi informasi dapat berupa perangkat lunak, jaringan komputer, internet yang dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk memudahkan suatu proses sehingga dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Dengan perkembangan teknologi pada saat ini dapat membuka

peluang bagi berbagai pihak dalam mengakses teknologi informasi pada saat ini. Dalam pelaporan keuangan dapat digunakan untuk mengakses, mengelola, serta mendayagunakan informasi keuangan secara tepat dan akurat (Harnoni, 2016). Hal ini berarti semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi pada saat ini maka semakin pula kemudahan untuk mengakses informasi pada laporan keuangan. Namun dibutuhkan pula personil yang dapat mengoperasikan teknologi informasi sehingga tidak menimbulkan kesalahan bagi para pengaksesnya.

#### 6. Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dalam pasal 32 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Seperti yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagai landasan penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar dari konsep penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman untuk penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan. Para pengguna laporan

keuangan dapat mencari permasalahan atas masalah yang tidak terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **B. Penurunan Hipotesis**

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Upaya organisasi dalam mencari tujuannya tidak lepas dari potensi sumber daya manusia itu sendiri. Dengan majunya teknologi pada saat ini, perkembangan informasi yang ada, serta tersedianya modal yang memadai, apabila tanpa didukung dengan sumber daya manusianya, organisasi tidak akan dapat mencapai tujuannya (Sutrisno, 2011). Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam penelitian Andini dan Yusrawati (2015), Rahayu., dkk (2014), Wati., dkk (2014), dan Nurlis *and* Yadiati (2017) menyatakan kompetensi sumber daya manusia memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini peneliti juga sependapat dengan peneliti di atas untuk merumuskan hipotesis yakni:

H<sub>1</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



### **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, menyusun, dan menyimpan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dimana kualitas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintahan (Sutabri, 2014). Dengan adanya teknologi informasi akan mempermudah penyusunan laporan keuangan serta meningkatkan kinerja. Dalam penelitian Julita *and* Susilastri (2018), Alamsyah., dkk (2017), Hertati (2015), Suwanda (2015), Idward., *et al* (2018), Nuryanto *and* Afiah (2013), dan Muda., *et al* (2017) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini peneliti juga sependapat dengan peneliti di atas untuk merumuskan hipotesis yakni:

H<sub>2</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

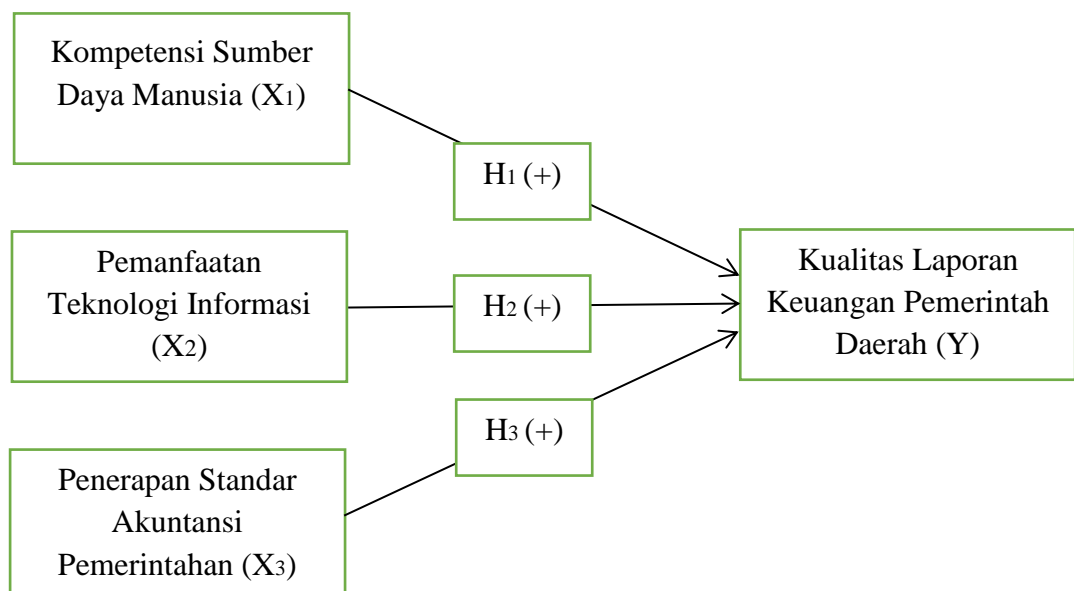
Penyampaian laporan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas harus mempunyai prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Nugraha, 2009). Sesuatu yang tidak mengikuti standar yang ada, tidak dapat dikatakan baik. Dalam penelitian Yunita (2015), Susilawati *and* Sudarno (2014), dan Hapazah (2017) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memengaruhi

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti juga berpendapat sama, maka dirumuskan hipotesis:

H<sub>3</sub>: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### C. Model Penelitian

Model penelitian ini untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui apakah ada pengaruh hubungan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Model penelitian ini bertujuan untuk memudahkan jalan permasalahan yang akan dibahas. Model penelitian tampak pada Gambar 2.1 berikut:



**GAMBAR 2.1.**  
Model Penelitian